

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Pengertian Judul

Pengertian judul “Redesain Kantor Polresta Jambi Dengan Pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana Kebakaran” adalah sebagai berikut:

**Redesain:**

Redesain merupakan suatu kegiatan merancang dan merencanakan ulang objek bangunan yang sudah tersedia berdasarkan fungsi dan kebutuhan, baik secara keseluruhan bangunan maupun hanya sebagian dan tidak merubah fungsinya serta hanya merubah pada bentuk fasade saja (Collins English Dictionary, 2009).

**Kantor Polresta Jambi:**

Kantor Polresta Jambi adalah kantor tempat pelaksana tugas Kepolisian RI Kota madya Jambi. Menjalankan tugas utama, Keberadaan Polisi Resort Kota di Jambi dibantu oleh para satuan kerja yang berada di posisi bawah, diantaranya Satreskrim, Satresba, Satlantas, Satbhara, Sattahti, Sattelkam, serta anggota bagian humas polri. Kantor Kepolisian sendiri berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menjaga agar tercipta keamanan, ketertiban, penegakan hukum, keterlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat. Selain itu, juga berfungsi untuk melaksanakan perintah kepolisian di daerah hukumnya dengan mengikuti peraturan yang tersedia di perundang-undangan (Poerwadarminta,1990).

**Arsitektur Tanggap Bencana:**

Arsitektur Tanggap Bencana memiliki arti yaitu sebuah arsitektur dengan pendekatan berfokus kepada penggunaan desain pada sebuah Kawasan ataupun bangunan yang diterapkan untuk mengatasi dampak dari terjadinya bencana serta tahan terhadap segala bencana, bertujuan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan jika terdapat korban jiwa, dengan mengimplementasikan nilai-nilai konsep perancangan Arsitektur yang peduli dan sadar akan terjadinya bencana yang bisa menurunkan efek negatif bencana pada bangunan hingga Kawasan.

**Kebakaran:**

Kebakaran memiliki makna berdasarkan Organisasi Labour International (ILO, 1991), yang mana kebakaran dapat diartikan suatu keadaan yang tidak diharapkan dan terkadang tidak dapat dikontrol. Kebakaran itu sendiri merupakan efek dari pembakaran sebuah bahan di dalam udara dan menghasilkan nyala api dan panas energi.

Jadi pengertian judul **“Redesain Kantor Polresta Jambi Dengan Pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana Kebakaran”** adalah merencanakan ulang tanpa merubah fungsinya yang memiliki satu atau beberapa bangunan yang mana menyediakan pelayanan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, keterlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat yang terletak di kota Jambi dengan penerapan konsep pendekatan pada Arsitektur Tanggap Bencana Kebakaran.

## 1.2. Latar Belakang

UU Nomor 24 Th. 2007 mengenai Pengendalian Bencana mengartikan bencana sebagai kejadian alias rentetan kejadian yang memberi ancaman serta gangguan pada kehidupan penduduk. Bencana dapat terjadi karena faktor alami maupun faktor teknis dan manusia yang dapat menyebabkan jatuhnya korban, lingkungan rusak, kehilangan harta benda serta memberi dampak buruk bagi psikologis korbannya. Data dari Badan Nasional 3 Penanggulangan Bencana menunjukkan keadaan Indonesia yang memiliki banyak kejadian bencana. Di tahun 2016 sendiri telah terjadi 2.342 bencana di Indonesia. Ini merupakan salah satu tahun dengan rekor tertinggi. Jika dilihat dari beberapa tahun belakangan yaitu tahun 2012-2015 berturut-turut telah terjadi bencana sebanyak 1.732 bencana, 1.967 bencana, 1.674 bencana, dan 1.811 bencana. Terjadi kenaikan sebanyak 35% pada tahun 2016 jika dibandingkan yang terjadi pada tahun 2015. Kota Jambi ialah satu dari wilayah yang kerap mengalami bencana terutama kebakaran. Berdasarkan Peta yang dikeluarkan BMKG pada Januari 2014, Jambi wilayah Timur adalah wilayah yang rawan terhadap bencana kebakaran. (Data & informasi bencana Indonesia BNPB).

Kebakaran adalah suatu bencana yang memberikan efek negatif bagi seluruh pihak. Terjadinya tidak dapat diprediksi dan jika sudah terjadi akan sulit mengendalikannya dan menyebabkan timbulnya kerugian besar. Hal tersebut adalah akibat dari minimnya kesadaran dampak dari kebakaran, tidak ada cara penanggulangan yang menyatu serta fasilitas sistem pencegahan kebakaran yang layak. Terkait faktor keselamatan yang harus dimiliki suatu bangunan menurut UU No 28 tahun 2002 pasal 1 adalah keselamatan dari bahaya kebakaran ataupun ledakan. Mengingat kebakaran dapat terjadi di bangunan manapun, tidak terkecuali bangunan yang dipergunakan sebagai tempat pelayanan publik, sudah seharusnya bangunan-bangunan yang dibangun dilengkapi juga dengan desain yang juga berfungsi dalam mendukung keselamatan dari bencana. Tak hanya kerugian bangunan, kebakaran juga menyebabkan kerugian pada harta benda serta jiwa manusia (Dwiki Alamanda Azhimi M, 2018)

Bangunan Pelayanan Publik merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pelayanan tersebut dapat mencakup pelayanan di bidang pemerintahan, ataupun pelayanan di bidang perekonomian maupun keamanan. Tujuan dibangunnya bangunan ini tidak untuk digunakan oleh perorangan. Bangunan ini dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kegiatan apa yang dilakukan di dalam bangunan tersebut. Ini merujuk pada pembagian yang dipengaruhi keadaan dunia pada kala ini. Dapat terjadi di waktu yang akan hadir jenis fasilitas lainnya karena kebutuhan semakin berkembang. Ini semua bergantung pada perubahan dunia dan kebutuhan masyarakat. Sekarang ini, adanya standar yang ditetapkan secara internasional adalah karena tidak terhindarkannya kemajuan dan perubahan dalam dunia global sehingga seluruh aktivitas manusia juga turut bergerak dengan cepat. Contohnya adalah mobilitas tinggi manusia untuk berpindah lokasi antar negara ataupun antar daerah dengan cepat. Desain bangunan yang menjadi standar secara umum seluruh dunia adalah hasil dari kesepakatan para perancang bangunan dari seluruh dunia saat dunia memasuki abad 20. Diantara arsitek-arsitek tersebut adalah Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright dan Le Corbusier. Salah satu contoh bangunan

Pelayanan publik yaitu kantor polisi yang menjadi bangunan pelayanan masyarakat dalam hal keamanan, ketertiban, penegakan hukum, keterlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat.

Kantor polisi adalah bangunan kepemilikan atas nama negara yang beroperasi selama 24 jam penuh untuk kegiatan melayani masyarakat. Tak hanya terdapat berkas-berkas penting, bangunan ini juga menjadi tempat banyak orang berkegiatan. Selain itu, di dalamnya juga menjadi tempat disimpannya senjata api. Seperti yang diketahui, senjata api memiliki sifat yang mudah terbakar. Kendati demikian, hingga kini tidak sedikit bangunan kantor polisi yang tidak mempertimbangkan metode pencegahan terhadap resiko terjadinya kebakaran. Berdasarkan penjelasan di atas, kantor polisi memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran. Beberapa kejadian yang menjadi bukti, yaitu:

1. Kebakaran di Polda Jawa Tengah, 2015. Kejadian ini berdampak kerugian materil mencapai 37 miliar rupiah. Di luar kerugian materil, kerugian lain seperti lenyapnya data penting, termasuk dokumen intelijen terkait terorisme yang berupa lembar dokumen fisik juga terjadi sebagai akibat dari bencana kebakaran tersebut. Dalam kejadian tersebut, para petugas berupaya menyelamatkan berbagai barang dan dokumen penting. Barang-barang tersebut diantaranya puluhan senjata api, kendaraan, dan lebih dari 60 tahanan juga turut diselamatkan (Kompas, 6 Oktober 2015).
2. Terjadinya insiden kebakaran di Markas Polisi Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan menyebabkan lenyapnya barang bukti berupa Sabu 300gram serta dokumen penyidikan (Satuan Kriminal) turut lenyap. Lebih dari 70 tahanan di dalam Mapolda juga diungsikan. Akibat kejadian ini, diperkirakan jumlah kerugian materil mencapai lebih dari 300 jt rupiah (Lintas terkini, 16 April 2016).
3. Kebakaran di Polda Jatim mengakibatkan hangusnya ruang Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal) polda Jatim serta sejumlah barang bukti dan berkas penyelidikan (Merdeka.com, 12 januari 2014).
4. Markas kantor Polisi Sektor (Polsek) Klojen, Kota Malang mengalami kebakaran saat pagi hari tanggal 25 Mei 2017, Kamis. Kejadian tersebut terjadi di area ruang senjata dan Musala Polsek. Kapolres Malang Kota, AKBP Hoiruddin berkata bahwa para tahanan dipindahkan ke Polres Malang Kota (Benni indo, 27 mei 2017).
5. Kebakaran di Polsek Amanuban Tengah pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 terjadi saat pagi pukul 06.00 Wita. Api diduga berasal dari gudang di dekat ruang tahanan, kemudian menjalar ke 2 bangunan rumah milik Polsek yang menyebabkan bangunan tersebut terbakar. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan setelah menghancurkan sebagian dokumen penting milik Polsek Amanuban Tengah. Pemadaman berusaha dilakukan oleh petugas yang sedang melaksanakan piket. Saat itu, api telah merambat. Setelahnya 2 mobil tangki milik penduduk sedang melewati jalan di depan kantor Polisi Sektor(Polsek) dan langsung membantu memadamkan api. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat seorang tahanan bernama Yesaya Nenoliu. Api menjalar ke ruang tahanan. Lantas polisi menyelamatkan tahanan tersebut dengan cara menjebol tembok bagian belakang ruang tahanan (Vox ntt, 29 November 2016).

Tingginya resiko bencana kebakaran dikantor polisi menjadikan bangunan tersebut rawan. Pada Kantor Polresta Jambi sendiri sistem perlindungan kebakaran atau sistem pengingat bahaya pada gedung SPKT masih sangat minim. Hanya terdapat 1 APAR dibangunan SPKT yaitu dibagian koridor, hal ini tentu masih belum memenuhi standar bangunan yang tanggap bencana kebakaran. Akses/sirkulasi jalan di dalam ruangan masih sangat sempit dan belum memenuhi standar ruang evakuasi atau sarana penyelamatan. seperti tidak adanya jalur evakuasi dan Pintu darurat hal ini tentu sangat beresiko membahayakan keselamatan para tahanan jika terjadi bencana. Maka dari itu perlunya redesain yang dilakukan agar menjadi bangunan dengan pendekatan tanggap bencana kebakaran.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dalam perencanaan Kantor Polresta Jambi dengan Pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana, masalah yang dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimana konsep dan rancangan Kantor Polresta di Jambi dengan pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana Kebakaran?
- b. Bagaimana menentukan konsep dan desain penataan ruang dan tata letak fasilitas building safety yang baik pada bangunan kantor polisi terhadap aspek keselamatan dan keamanan jika terjadinya bencana kebakaran?
- c. Bagaimana menentukan konsep dan desain jalur sirkulasi dan evakuasi pada bangunan kantor polisi agar aman terhadap bencana kebakaran?

### **1.4. Tujuan dan Sasaran**

#### **1.4.1. Tujuan**

Perancangan Kantor Polresta Jambi dengan Pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana ini mempunyai beberapa tujuan, tujuan tersebut yaitu:

- a. Mengetahui dan menerapkan konsep serta desain Arsitektur Tanggap Bencana Kebakaran pada Kantor Polresta di Jambi.
- b. Mengetahui dan membuat tata ruang dan letak building safety yang baik pada bangunan Kantor Polresta Jambi jika terjadinya bencana kebakaran.
- c. Mengetahui dan membuat jalur sirkulasi serta evakuasi yang baik pada bangunan kantor polisi agar aman terhadap bencana kebakaran.

#### **1.4.2. Sasaran**

Perencanaan Kantor Polresta Jambi dengan Pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana ini memiliki sasaran yaitu:

- a. Dapat menjadi sarana keamanan, ketertiban, penegakan hukum, keterlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat bagi masyarakat kota Jambi dan sekitarnya.
- b. Dapat memberikan keamanan bagi para pengguna dan pengunjung terhadap terjadinya bencana kebakaran

- c. Dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah bangunan Kantor Polisi yang baik terutama pada aspek bencana kebakaran

## **1.5 Lingkup Pembahasan**

Lingkup pembahasannya berfokus pada persoalan keamanan bangunan terhadap bencana pada bangunan kantor polresta yang ada di Jambi dengan pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana Kebakaran.

## **1.6. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan yaitu berupa perencanaan rancangan desain dan konsep Kantor Polresta yang aman dan baik dengan pendekatan Arsitektur Tanggap Bencana Kebakaran.

## **1.7. Metodologi Pembahasan**

### **1.7.1. Metode**

Metode yang akan diaplikasikan dalam pembahasan yaitu sintesa dan analisa. Data-data yang dihasilkan akan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan sebagai fokus utama perancangan Redesain Kantor Polresta di Jambi.

### **1.7.2. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Studi literatur
- b. Observasi di lokasi perencanaan secara langsung
- c. Studi banding

### **1.7.3. Pengolahan Data**

Perolehan data akan dianalisis dengan metode mengelompokkan dan mengidentifikasi dengan persoalan-persoalan yang ada. Data-data tersebut selanjutnya dibahas bertujuan untuk mencari hubungannya sehingga ditemukan benang merah untuk menghasilkan konsep perencanaan Redesain Kantor Polresta yang tepat.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

- **BAB I PENDAHULUAN**  
Bab ini berisikan tentang pengertian dan makna dari judul, latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, keluaran/desain yang dihasilkan, metodologi pembahasan, serta sistematika penulisan
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**  
Bab ini berisikan tentang kajian obyek, studi kasus, serta elemen perancangan terkait.
- **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN**  
Bab ini berisikan tentang lokasi/data fisik yang sesuai dengan data terbaru. Selain itu juga berisikan tentang data sebaran aktifitas, penduduk dan lingkungan sosial lain, data non fisik, serta gagasan perancangan
- **BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

Bab ini berisikan tentang Analisa dan konsep makro yaitu kota atau Kawasan, serta Analisa dan konsep mikro yaitu konsep site, ruang, massa, tampilan arsitektur, struktur dan utilitas, serta penekanan arsitektur tanggap bencana kebakaran.